

## **Pengaruh Sistem Pengendalian Intern dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah di Pemerintahan Kabupaten Malang**

**Fahkrurrohim Hardika Wibisono<sup>1\*</sup>, Junaidi<sup>2</sup>, Hariri<sup>3</sup>**

<sup>1,2,3</sup> Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Islam Malang

\*Email Korespondensi: hardikakj87@gmail.com

### **ABSTRACT**

*This research aims to analyze the effect of internal control and regional financial accounting systems on the quality of financial reports in the Malang Regency Government. The population used in conducting this research was 40 people who work in accounting. The data collection technique in this study was purposive sampling. The sample selected was 36 people with data collected using the questionnaire method. The test used in this research is simultaneous or joint testing (t), the test of the coefficient of determination ( $R^2$ ), and partial testing (f). The results showed that the t-test in the independent variable had a significant effect on the dependent variable. Meanwhile, in the f-test two variables influence the quality of financial reports in the Malang Regency Government.*

**Keywords:** Internal control system, regional financial accounting system, quality of financial statements, government of Malang regency.

### **PENDAHULUAN**

#### **Latar Belakang**

Di era reformasi pengelolaan laporan keuangan yang mengalami perubahan secara terus menerus. Perubahan regulasi tersebut bertujuan untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik dan pemerintahan yang bersih. Penyusunan laporan keuangan yang berpedoman kepada standar akuntansi pemerintahan sesungguhnya dalam peningkatan laporan keuangan serta kinerja pemerintahan, agar mewujudkan laporan keuangan serta kinerja pemerintahan yang transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah. Menurut Kementerian Keuangan adanya peningkatan dalam kualitas laporan keuangan pemda selama keadaan krisis di tahun 2021. Sebanyak 482 dari 542 laporan keuangan pemerintahan mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian yang terdiri atas 33 pemerintahan provinsi, 88 pemerintahan kota, 365 pemerintahan kabupaten. (Menkeu: *Kualitas Laporan Keuangan Pemda Membaik, 89 Persen Dapat Opini WTP - Tribunnews.Com*, n.d.)

Akuntabilitas publik adalah kewajiban untuk mengelola sumber daya, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas atau kegiatan yang berkaitan sumber daya publik yang diberi mandat (Rahmawati et al., 2018). Bentuk pertanggungjawaban dalam melakukan suatu pemerintahan diatur oleh peraturan Undang-Undang no. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang no. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Salah satu cara untuk terwujudnya transparansi dan akuntabilitas dalam mengelola suatu keuangan pemerintahan, baik pusat maupun daerah laporan pertanggungjawaban berupa bentuk laporan keuangan.

Kualitas laporan keuangan pemerintahan adalah penyajian laporan keuangan yang sesuai dengan kriteria dalam Standar Akuntansi Publik, kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap aturan perundang-undangan yang berlaku, dan keefektifitasan sistem pengendalian intern. Kualitas laporan keuangan sangat berpengaruh kepada akuntabilitas atau pertanggungjawaban atas laporan keuangan terhadap pemberian opini dan kewajaran informasi (Evicahyani & Setiawina, 2016)

Sistem pengendalian internal dalam organisasi mutlak harus jadi hal utama dalam kegiatan operasional dan kinerja memerlukan sebuah hal khusus dalam hal kemudahan dan

memberikan batasan dalam ketentuan khusus dalam setiap pelaksanaan kegiatan. Menurut (Faishol, 2016) sistem pengendalian intern memiliki beberapa elemen yang digunakan yaitu lingkungan pengendalian, resiko pengendalian, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi. Salah satu elemen dalam sistem pengendalian adalah lingkungan pengendalian merupakan dasar untuk melakukan kegiatan operasional suatu entitas yang aman, sehat, dan berkembang secara wajar.

Dalam penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh (Mokoginta et al., 2017) yang berkaitan dengan sistem pengendalian intern berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan daerah di Pemerintahan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara sudah berjalan dengan baik namun dalam prakteknya belum efektif dan efisien sehingga berpengaruh terhadap kurangnya kualitas laporan keuangan. Dan juga penelitian oleh (Kiranayanti & Erawati, 2016) menyatakan bahwa pengendalian sistem pengendalian intern berpengaruh dalam laporan keuangan di Kabupaten Badung.

Sistem akuntansi keuangan daerah adalah merupakan suatu rangkaian prosedur yang dimulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, hingga laporan keuangan yang dipertanggungjawabkan (Ardianto & Eforis, 2019). Dalam penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh (Defitri, 2018) yang berkaitan dengan sistem akuntansi keuangan daerah yang berpengaruh terhadap laporan keuangan daerah. Dalam laporan keuangan di pemerintahan Kota Solok berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan, membuktikan bahwa sistem akuntansi keuangan daerah berjalan secara efektif.

Dalam Laporan Keuangan Pemerintahan Daerah setiap periode akan diberikan penilaian berupa opini yang diberikan oleh Badan Pengawas Keuangan (BPK). Terdapat 4 opini yang diberikan oleh pemeriksa yaitu: Wajar Tanpa Pengecualian, Wajar Dengan Pengecualian, Tidak Wajar, dan Tidak Memberi Pendapat. Dalam penyesuaian laporan keuangan pemerintahan daerah di Indonesia menggunakan peraturan yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Informasi dalam setiap laporan keuangan pemerintahan daerah dapat dikatakan jika memenuhi kriteria yaitu relevan, andal, dapat dipahami, dan dapat dibandingkan.

Akuntansi keuangan daerah memiliki peranan penting dalam pengelolaan laporan keuangan daerah agar berjalan sebagaimana semestinya. Selama ini dalam melakukan pelaporan, baik dipusat dan pemerintahan daerah terkesan belum memenuhi kebutuhan informasi pemakainya. Alasan peneliti memilih objek penelitian ini karena berdasarkan laporan audit BPK pada tahun 2021 opini yang diberikan kepada laporan keuangan pemerintahan Kabupaten Malang pada tahun 2020 BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Kabupaten Malang mendapatkan WTP selama 7 tahun berturut-turut, namun dalam laporan keuangan tahun 2020 ditemukan adanya kelemahan di sistem pengendalian intern dan ketidaksesuaian terhadap peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik melakukan kajian dan penelitian lebih lanjut dengan judul **“Pengaruh Sistem Pengendalian Intern dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintahan di Kabupaten Malang”**.

#### **Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka didapatkan rumusan masalah dalam penelitian dalam penelitian ini sebagai berikut :

- a. Apakah Sistem Pengendalian Intern dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dapat berpengaruh terhadap kualitas dalam laporan keuangan pemerintahan Kabupaten Malang?
- b. Apakah Sistem Pengendalian Intern dapat berpengaruh terhadap kualitas dalam laporan keuangan pemerintahan Kabupaten Malang?
- c. Apakah penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dapat berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintahan Kabupaten Malang?

### **Tujuan Penelitian**

Berdasarkan uraian latar belakang dan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian yang dirumuskan sebagai berikut:

- a. Menganalisa pengaruh penerapan Sistem Pengendalian Intern terhadap kualitas laporan keuangan pemerintahan daerah Kabupaten Malang
- b. Menganalisa penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintahan daerah Kabupaten Malang
- c. Menganalisa pengaruh Sistem Pengendalian Intern dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Kabupaten Malang

### **Manfaat Penelitian**

Manfaat secara teoritis dalam hasil penelitian ini dapat diharapkan menjadi bahan dalam serta menambah informasi dalam pentingnya penerapan Sistem Pengendalian Intern dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terhadap kualitas laporan keuangan daerah. Manfaat praktis dalam hasil penelitian ini sebagai sumber acuan informasi dan pertimbangan dalam pengambilan suatu kebijakan, dan memberikan kontribusi bagi praktik akuntansi di Indonesia pada masa mendatang dan memberikan wawasan bagi SKPD terhadap penerapan sistem pengendalian dan sistem akuntansi keuangan daerah dalam keefektivitasan laporan keuangan di suatu pemerintahan daerah.

### **Sistem Pengendalian Intern**

Menurut (Mokoginta et al., 2017) sistem pengendalian intern meliputi organisasi, metode dan ukuran dikoordinasikan oleh menjaga kekayaan dalam organisasi, pengecekan ketelitian dan keandalan dalam data akuntansi, mendorong efisiensi dan dipenuhinya dalam kebijakan oleh para manajemen. Sistem Pengendalian Internal Pemerintahan (SPIP) berdasarkan UU no. 60 Tahun 2008, Sistem Pengendalian Internal adalah proses integral dalam tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus meyakinkan para pimpinan dan para karyawan atas tercapainya kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan dalam pelaporan keuangan, dan pengamanan atas aset negara dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Menurut COSO pengendalian intern terdiri dari 5 komponen yaitu Lingkungan Pengendalian, Penilaian Risiko, Aktivitas Pengendalian, Informasi dan Komunikasi, Aktivitas Pemantauan. Sedangkan menurut PP no 60 Tahun 2008 dalam Sistem Pengendalian Internal Pemerintahan, ada 5 unsur yang ada dalam sistem pengendalian tersebut Lingkungan Pengendalian, Penilaian Risiko, Kegiatan Pengendalian, Informasi dan Komunikasi, dan Pemantauan. Tujuan adanya pengendalian internal akan menjaga kekayaan yang diperoleh organisasi, dengan adanya pengendalian internal dapat mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, serta dapat mendorong efisiensi yang dilakukan oleh perusahaan, dan mendorong organisasi atau perusahaan dipatuhinya kebijakan manajemen.

### **Sistem Akuntansi Keuangan Daerah**

Akuntansi keuangan adalah suatu proses mengidentifikasi, pengukuran, dan pelaporan transaksi keuangan dari suatu daerah yang dijadikan sebuah informasi dalam melakukan pengembalian keputusan Akuntansi Keuangan Daerah adalah sistem akuntansi yang terdiri dari seperangkat kebijakan, standar dan prosedur yang dapat menghasilkan laporan keuangan yang relevan, andal, dan tepat waktu untuk menghasilkan laporan keuangan yang digunakan pihak internal dan eksternal pemerintahan untuk menentukan suatu keputusan ekonomi. Prosedur sistem akuntansi keuangan daerah meliputi prosedur akuntansi penerimaan kas, prosedur akuntansi pengeluaran kas, prosedur akuntansi aset tetap/barang milik daerah, prosedur akuntansi selain kas, penyajian laporan keuangan.

### **Kualitas Laporan Keuangan**

Laporan keuangan adalah salah satu ringkasan dari proses pencatatan, ringkasan dari transaksi keuangan yang terjadi selama satu tahun yang bersangkutan dan merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat terhadap atas pengelolaan dana daerah baik

melalui pajak, retribusi, maupun transaksi lainnya. Karakteristik kualitas laporan menurut Peraturan Pemerintah no 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) adalah ukuran-ukuran normatif yang diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga tujuan dalam sebuah organisasi. Karakteristik kualitas laporan menurut peraturan tersebut meliputi (1) relevan, (2) andal, (3) dapat dibandingkan, (4) dapat dipahami.

## METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan menggunakan jenis penelitian kuantitatif. Jenis penelitian kuantitatif adalah jenis data-data yang berupa angka dalam jumlah banyak dan data mengenai sistem pengendalian internal (Faishol, 2016). Penelitian yang digunakan melalui pendekatan kuantitatif.

Populasi dalam penelitian ini adalah pegawai dibagian Bidang Akuntansi di Badan Keuangan dan Aset Kabupaten Malang, berjumlah 40 koresponden. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan *purposive sampling* sebanyak 36 koresponden, dengan kriteria pejabat yang bertanggungjawab dalam melaksanakan fungsi akuntansi di BKAD Kabupaten Malang, dan mempunyai masa kerja sudah memasuki satu periode dalam melakukan penyusunan suatu laporan keuangan.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan kuesioner. Kuesioner ini disusun menggunakan skala *likert* 1-5 untuk mengukur penerapan sistem pengendalian intern, pemahaman sistem akuntansi keuangan daerah, serta kualitas laporan kualitas pemerintahan Kabupaten Malang berdasarkan sikap, pendapat, dan persepsi responden.

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji validitas dan reliabilitas, uji normalitas, serta uji asumsi klasik terdiri atas uji multikolinearitas dan uji heteroskedastisitas. Sementara, untuk teknik analisa yang digunakan menggunakan teknik analisa regresi linier berganda untuk pengujian hipotesis secara simultan (uji f) dan hipotesis secara parsial (uji t) pada taraf signifikansi 0,05, dan seluruh proses pengelolaannya menggunakan aplikasi SPSS 24.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pengujian normalitas dalam penelitian ini menggunakan uji *Kolmogorov-Smirnov* pada taraf 0,05. Pada pengujian tersebut diperoleh dari nilai *Asymp. Sig (2 tailed)* variabel sistem pengendalian intern, sistem akuntansi keuangan daerah, dan kualitas laporan keuangan daerah  $> 0,05$  maka data residual pada masing-masing variabel tersebut berdistribusi normal.

Uji multikolinearitas, dilakukan dengan membandingkan nilai *Tolerance* dan VIF dari nilai yang diberikan oleh SPSS. Dalam penelitian ini nilai *Tolerance* seluruh variabel sebesar 0,172 atau lebih besar dari 0.1 dan nilai VIF 5,806 atau kurang dari 10. Jadi dapat dikatakan bahwa masing-masing variabel independen dalam model regresi ini tidak ada terjadinya multikolinearitas. Sedangkan, dalam uji Heteroskedastisitas peneliti menggunakan metode *scatterplot* agar tidak terjadi gangguan dalam variabel tersebut. Dalam penelitian ini, tidak ada terjadinya gangguan heteroskedastisitas dikarenakan persebaran titik yang berada dibawah 0 hingga diatas 0.

### **Pengaruh penerapan Sistem Pengendalian Intern dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan.**

Berdasarkan uji F (*anova*) diketahui nilai signifikansi F yang ada dalam penelitian ini sebesar 0,000, yang berarti nilai signifikansi nilainya kurang dari 0,005 ( $0,000 < 0,005$ ), maka dengan penelitian ini H1 dapat diterima dan H0 ditolak. Dengan ini disimpulkan bahwa sistem pengendalian intern, sistem akuntansi keuangan daerah secara simultan terhadap mempunyai pengaruh positif secara signifikan terhadap kualitas laporan keuangan di Pemerintahan Kabupaten Malang. Hal ini terjadi karena dalam sistem pengendalian intern yang dijalankan

oleh pemerintahan kabupaten malang dapat berjalan dengan baik. Adanya pengendalian lingkungan yang baik, penilaian resiko yang baik dengan adanya identifikasi dan evaluasi sehingga dapat diperkirakan intensitas dan tindakan dalam meminimalisir terjadinya kesalahan.

Sementara itu, dalam uji koefisien determinasi (*adjusted R Square*) sebesar 0,475 yang menunjukkan seberapa besar nilai variabel sistem pengendalian intern dan sistem akuntansi keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan di Pemerintahan Kabupaten Malang sebanyak 47,5 %. Sedangkan sebanyak 52,5 % dapat dijelaskan oleh variabel-variabel lainnya yang diluar penelitian.

### **Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan**

Berdasarkan dari nilai uji t, diketahui nilai t dari variabel sistem pengendalian intern sebesar 1.619 dan signifikasi t sebesar 0,005. Jika nilai signifikasi lebih kecil daripada nilai yang ditentukan ( $0,005 < 0,05$ ), maka nilai hipotesis H1 dapat diterima dan H0 ditolak. Dapat disimpulkan bahwa variabel sistem pengendalian intern secara parsial mempunyai pengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Malang. Arah positif ini dapat dibuktikan dengan nilai koefisien variabel sistem pengendalian intern ( $\beta_1 X_1$ ) sebesar 0.564. yang berarti jika sistem pengendalian intern ditingkatkan satu satuan maka nilai variabel kualitas laporan keuangan akan meningkat sebesar 0,564.

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Yendrawati (2013) dengan hasil penelitian yang menyatakan bahwa Sistem Pengendalian Intern berpengaruh terhadap kualitas informasi laporan keuangan daerah.

### **Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah**

Berdasarkan nilai uji t, dalam pengujian ini nilai t variabel sebesar 1,693 dan nilai signifikasi t sebesar 0,003. Karena nilai signifikasi lebih kecil daripada nilai yang ditentukan maka H2 dapat diterima dan H0 ditolak. Maka dalam hasil penelitian ini variabel sistem pengendalian intern secara parsial mempunyai pengaruh positif terhadap variabel kualitas laporan keuangan Pemerintahan Kabupaten Malang. Arah positif dapat dibuktikan dengan nilai koefisien yang dimiliki variabel sistem akuntansi keuangan ( $\beta_2 X_2$ ) sebesar 0,414, yang berarti jika nilai variabel sistem akuntansi keuangan daerah ditingkatkan satu satuan maka nilai variabel kualitas laporan keuangan akan meningkat sebesar 0,414.

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Rohmah et al., 2020) bahwa Sistem Akuntansi Keuangan Daerah secara parsial dapat berpengaruh terhadap Kualitas laporan keuangan Pemerintahan Kota Malang.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

### **Simpulan**

1. Variabel Sistem Pengendalian Intern dan Sistem Akuntansi Keuangan dapat berpengaruh secara simultan terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintahan Kabupaten Malang
2. Variabel Sistem Pengendalian Intern secara parsial memiliki pengaruh terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintahan Kabupaten Malang
3. Variabel Sistem Akuntansi Keuangan Daerah secara parsial memiliki pengaruh terhadap kualitas laporan keuangan

### **Saran**

1. Sebaiknya untuk peneliti berikutnya dapat memperluas sampel penelitian dan tidak perlu berfokus pada suatu batasan tertentu sehingga dengan demikian dapat meningkatkan generalisasi penelitian
2. Sebaiknya peneliti berikutnya dapat diharapkan untuk menggunakan metode pengumpulan data tambahan sehingga dapat memperkuat pengaruh antar variabel independen dan dependen dalam penelitian, dengan semisal menggunakan metode wawancara

3. Sebaiknya peneliti berikutnya dapat diharapkan menambahkan atau mengkaji dengan lebih baik serta komprehensif dalam memilih suatu variabel untuk model penelitian dalam melakukan suatu penelitian

#### DAFTAR PUSTAKA

- Ardianto, R., & Eforis, C. (2019). Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Bina Akuntansi*, 6(1), 95–136. <https://doi.org/10.52859/jba.v6i1.44>
- Defitri, S. Y. (2018). Pengaruh Pengelolaan Keuangan Daerah Dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Benefita*, 3(1), 64. <https://doi.org/10.22216/jbe.v3i1.2376>
- Evicahyani, S. I., & Setiawina, N. D. (2016). ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TABANAN dilakukan secara kontinyu pada setiap periode tertentu dala. *E-Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Universitas Udayana*, 3, 403–428.
- Faishol, A. (2016). Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Studi Kasus Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Lamongan). *Jurnal Penelitian Ekonomi Dan Akuntansi*, I(3), 205–212.
- Kiranayanti, I., & Erawati, N. (2016). Pengaruh Sumber Daya Manusia, Sistem Pengendalian Intern, Pemahaman Basis Akruar Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah. *E-Jurnal Akuntansi*, 16(2), 1290–1318.
- Menkeu: Kualitas Laporan Keuangan Pemda Membaik, 89 Persen Dapat Opini WTP - *Tribunnews.com*. (n.d.). Retrieved November 15, 2021, from <https://www.tribunnews.com/bisnis/2021/09/14/menkeu-kualitas-laporan-keuangan-pemda-membaik-89-persen-dapat-opini-wtp>
- Mokoginta, N., Lambey, L., & Pontoh, W. (2017). Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah. *Going Concern : Jurnal Riset Akuntansi*, 12(2), 874–890. <https://doi.org/10.32400/gc.12.2.18282.2017>
- Rahmawati, A., Mustika, I. W., & Eka, L. H. (2018). Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan SKPD Kota Tangerang Selatan. *Jurnal Ekonomi, Bisnis, Dan Akuntansi (JEBA)*, 20(2), 8–17. <http://jp.feb.unsoed.ac.id/index.php/jeba/article/view/1097>
- Rohmah, L., Noor Shodiq Askandar, & Sari, A. F. K. (2020). Pengaruh Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintah, Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Malang. *E-Jra*, 09(05), 43–51.
- Yendrawati, R. (2013). *PENGARUH SISTEM PENGENDALIAN INTERN DAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA TERHADAP KUALITAS INFORMASI LAPORAN KEUANGAN DENGAN FAKTOR EKSTERNAL SEBAGAI VARIABEL MODERATING*.